

Laporan Penelitian 2013

Perkara No. : 31/TIPIKOR/2011/PT.Bdg
Jo. No. 2104K/PID.SUS/2011

Terdakwa I : Maman Yudia
Terdakwa II : H. Tatun Daradjatun

I. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara (registrasi PT) : 31/TIPIKOR/2011/PT.Bdg
2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan : Pengadilan Tinggi Bandung
3. Tanggal putusan ditetapkan : 23 Juni 2011
4. Susunan majelis hakim : Ny. Serefina Sinaga, SH, MH (ketua)
Soebagio Wirosoemarto, SH, MHum (anggota)
Irwan Rambe, SH., MH (anggota)

II. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara (registrasi MA) : 2104K/PID.SUS/2011
2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan : Mahkamah Agung RI
3. Tanggal putusan ditetapkan : 1 Desember 2011
4. Susunan majelis hakim : Dr. Artidko Alkostar, SH., LLM (ketua)
H. Hamrat Hamid, SH (anggota)
Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH (anggota)

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang melanda pelbagai segi kehidupan (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tidak hanya terjadi di pusat akan tetapi juga di daerah dan tindak pidana korupsi mengenai kekayaan dan asset daerah yang seharusnya dikelola dan dijaga oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah tidak menjalankan amanat peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjaga dan menggunakan serta mengamankan kekayaan daerah. Bupati Subang Maman Yudia dan Kepala bagian Perlengkapan Kabupaten Subang Tatun Daradjatun, SH. Msi telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Terdakwa I Maman Yudia sebagai bupati Subang bersama- sama dengan Terdakwa II Tatun Daradjatun, SH. Msi telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kronologis singkat kejadiannya adalah berawal dari adanya defisit anggaran Kabupaten Subang, maka diadakanlah perubahan terhadap APBD Kabupaten Subang tahun 2008 guna mencari tambahan pendapatan dan pada bulan Juli 2008 perubahan APBD disahkan. Salah satu kegiatan dalam APBD perubahan yaitu adanya penghapusan/penjualan kendaraan dinas milik Pemda Subang dalam rangka menutupi defisit anggaran tersebut. Pada tanggal 8 September 2008 Terdakwa I yang pada saat itu selaku Wakil Bupati Subang menindaklanjuti pelaksanaan tersebut menerbitkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 024/KEP.373-PLK/2008 tentang Pembentukan Panitia Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang tertanggal 8 September 2008 beserta lampirannya berisi susunan panitia dan sekretariat team teknis administrasi dan fisik, yang pada intinya bertugas untuk meneliti dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan tidak mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, dihubungkan dengan biaya eksploitasi, persyaratan personil/pegawai pemohon dan lain-lain. Selain itu juga wajib mengadakan pengecekan/penelitian setempat seakurat mungkin sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaan kendaraan, persyaratan personil calon pembeli, landasan hukum serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara serta disampaikan kepada Bupati untuk bahan pertimbangan dalam penetapan kendaraan dinas yang dapat dijual/dihapus dari daftar barang inventaris.

Selain itu juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemohon dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah

Kabupaten Subang yang dapat dihapus/dijual tahun 2008, tertanggal 8 Oktober 2008 yang diundangkan di Subang tanggal 8 Oktober 2008 serta masuk dalam Berita Daerah Kabupaten Subang tahun 2008 No. 17 tahun 2008.

Pada tanggal 17 Nopember 2008 mengeluarkan lagi Surat Keputusan Bupati No.: 028/Kep.458-DPPKAD/2008 tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang yang ditandatangani Terdakwa I selaku Bupati beserta lampiran daftar kendaraan yang terdiri dari 140 unit kendaraan roda empat dan 298 unit kendaraan roda dua dengan rincian harga jual tiap-tiap kendaraan.

Proses penjualan kendaraan dilakukan tanpa melalui lelang baik lelang umum maupun lelang terbatas dan para panitia termasuk ketua panitia Drs. H. Rachmat Setiawan tidak mengetahui diangkat menjadi panitia dan tidak pernah melakukan rapat. Dalam pelaksanaan penghapusan/penjualan dilakukan dengan perbuatan/tindakan yang menyimpang serta tidak melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan tidak dibuatnya berita acara sebagai bentuk pertanggung jawaban setiap keputusan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan harga jual dan prosedur penjualan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 1971 tentang Penjualan kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara Ketika penjualan ini diinvestigasi oleh tim BPKP Jawa Barat ditemukan terjadinya kerugian negara sekitar Rp. 1.143.814.840,-.

Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Negeri pada tanggal 23 Juni 2011 dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana dalam dakwaan primair, oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan primair dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan dakwaan subsidair dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 1

Laporan Penelitian 2013

(satu) bulan kurungan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung tersebut baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

B. Posisi Kasus /Duduk Perkara

Tanggal	Keterangan
Juli 2008	H.Tatun Daradjatun,SH,MSi (Terdakwa II) selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Subang mengajukan usul dan permohonan untuk melakukan penghapusan (dumb) kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Subang kepada Bupati Subang.
18 - 09 - 2008	Maman Yudia Bin Alm.Dudung (Terdakwa I) sebagai wakil Bupati Subang menjabat sebagai Bupati Subang menggantikan Bupati Subang Eep Hidayat yang mengakhiri masa tugasnya periode 2003-2008 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32-736 tahun 2008 tanggal 18 September 2008.
8 - 09 - 2008	Terdakwa II membuat Surat Keputusan Bupati Nomor : 024/KEP.373-PLK/2008 tentang Pembentukan Panitia Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang menindaklanjuti usulan dari Terdakwa II dengan susunan panitia sebagai berikut : Ketua : Drs. H. Rachmat Setiawan Sekretaris : H.Tatun Daradjatun,SH,MSi Anggota : 1. Drs. H. Endang Aminulloh, M.Si 2. Ahmad Sobari, S.Sos 3. Koestoyo Wigoena, SH 4. Drs.H. Rahmat Solihin 5. Bebet Sulaeman 6. Endang Herdiana, SE., M.Si

Laporan Penelitian 2013

	7. Ubi Kartubi, AKS., M.Si
8 - 09 - 2008	<p>Dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 024/KEP.373-PLK/2008 tentang Pembentukan Panitia Penjualan kendaraan Bemotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang dibentuk juga Sekretariat Tim Teknis Administrasi dan Fisik Penjualan Kendaraan Bemotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang dengan beranggotakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mochamad Ridwan, SE: Bawasda Kab. Subang 2. Hasyim, Amd : BKD Kab. Subang 3. Abe Albert Huka : Kantor Kesbang Kab. Subang 4. Suryaman : Dinas Perhubungan Kab. Subang 5. Toto Heryanto : Bag. Perlengkapan Setda Kab Subang 6. A. Daryana : Bag. Perlengkapan Setda Kab Subang 7. Dadan Sukmayadi, S.IP : Bag. Perlengkapan Setda Kab Subang
	<p>Terdakwa II menjalankan Surat Keputusan Bupati Nomor : 024/KEP.373-PLK/2008 tanpa memberitahukan perihal Surat Keputusan Bupati tersebut kepada Ketua Panitia dan anggota panitia lainnya terkecuali kepada Bebet Sulaeman. Terdakwa II dan Bebet Sulaeman mengerjakan seluruh kelengkapan administrasi tanpa melibatkan anggota Panitia lainnya dan tercatat sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Subang yang akan dihapus dan dijual dengan perincian 140 (seratus empat puluh) unit kendaraan roda empat dan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) unit roda dua.</p>
8-10-2008	<p>Terdakwa I membuat Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Kriteria Pemohon dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang yang</p>

Laporan Penelitian 2013

	dapat dihapus/dijual tahun 2008, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Nopember 2008	Terdakwa II memerintahkan Ana Daryana membuat Nota Dinas Perihal Penandatanganan Naskah Surat Keputusan Bupati Subang tentang Penghapusan/Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang untuk ditanda tangani Plt Sekda Subang Drs. A. Lugaya Mukhtar, Msi, akan tetapi tidak ditanda tangani dikarenakan tidak dilampirkan SK Bupati
17-11-2008	Terdakwa I membuat disposisi dalam kop surat Bupati yang memerintahkan Plt Sekda menandatangani Nota dinas tersebut dan di paraf oleh Terdakwa I, dan kemudian di tanda tangani oleh Plt Sekda berdasarkan memo tersebut
17-11-2008	Terdakwa II memerintahkan Ana Daryana membuat Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penghapusan/Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang berikut lampiran SK. Selanjutnya sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Subang yang akan dihapus dan dijual dengan perincian 140 (seratus empat puluh) unit kendaraan roda empat dan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) unit roda dua yang seluruhnya sebesar Rp. 2.143.125.160,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) untuk diserahkan kepada pemohon/pembeli sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 tanggal 17 Nopember 2008 tanpa diikuti dengan pembuatan surat perjanjian sewa beli yang memuat

Laporan Penelitian 2013

	ketentuan dan cara batas waktu pembayarannya.
01-09-2009	<p>Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat melakukan Audit Investigasi atas dugaan tindak Pidana Korupsi Penghapusan/Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang dan ditemukan masih ada tersisa sebanyak 12 (dua belas) Pemohon belum melunasi/menyetorkan harga pembelian kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2008 ke kas Daerah Kabupaten Subang sebesar Rp. 62.609.200,- (enam puluh dua juta enam ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).</p> <p>Proses penghapusan/penjualan kendaraan Dinas milik pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2008 dilaksanakan menyimpang dari ketentuan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdakwa I membuat keputusan Bupati dan Peraturan Bupati tanpa menetapkan terlebih dahulu tata cara penjualan kendaraan apakah dilakukan secara lelang umum atau lelang terbatas, hal ini menyimpang dari :<ul style="list-style-type: none">- Ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 63 ayat (5), pasal 64 ayat (2)- lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 angka XI, angka 5. Proses Penghapusan Barang milik daerah dan angka XII, angka 3. Penjualan dan tukar menukar, pada alinea Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah serta angka 3, penjualan dan tukar menukar, pada alinea motivasi/pertimbangan lainnya yakni huruf f

	<p>penjualan kendaraan dinas dan rumah golongan III, angka 2) kendaraan dinas operasional, huruf g) pelaksanaan penjualan/pelelangan, yakni – pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>- Terdakwa I dalam membuat surat-surat Keputusan Bupati maupun Peraturan Bupati hanya menetapkan penghapusan dan penjualan kendaraan bermotor/perorangan dinas saja, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, ketentuan mengenai kendaraan dinas dibagi menjadi dua katagori yaitu kendaraan perorangan dinas (dipergunakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah) dan kendaraan operasional, namun dalam lampiran surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 tanggal 17 Nopember 2008 tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang, Terdakwa I tidak memperinci secara jelas dan pasti yang mana yang dimaksud dengan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional, bahkan sebagian besar kendaraan dalam SK tersebut adalah kendaraan dinas operasional yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, sebagian besar kendaraan dalam lampiran SK adalah kendaraan dinas operasional, ini menyimpang dari :</p> <p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, Bab XII, Bagian Kedua Paragraf 1 pasal 62 dan paragraf 2 pasal 63 serta lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 angka</p>
--	--

Laporan Penelitian 2013

	<p>XII, angka 3. Penjualan dan tukar menukar, pada alinea Motivasi/pertimbangan lainnya yakni : huruf f Penjualan kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III, angka 1) Kendaraan Perorangan Dinas dan angka 20 Kendaraan Dinas Operasional.</p>
	<p>Terdakwa II Selaku Sekretaris Panitia Mengerjakan Kelengkapan Administrasi Tanpa Melibatkan Anggota Panitia Lain Kecuali Bebet Sulaiman. Hasil kegiatan panitia hanya dilaporkan secara lisan kepada terdakwa I tanpa dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh anggota panitia yang berisi pertimbangan mengenai segi administratif, teknis dan ekonomis, sudah ada penggantinya dan tidak mengganggu kelancaran tugas, hal tersebut menyimpang dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Angka XI, Angka 5. Pada Alinea <i>Selanjutnya Pengelola Mengajukan Permohonan Persetujuan Kepada Kepala Daerah Mengenai Rencana Penghapusan Barang Dimaksud Dengan Melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Penghapusan</i>, Dan Angka XII, Angka 3 Penjualan Tukar Menukar, Pada Alinea Motivasi/Pertimbangan Lainnya Yakni : Huruf F Penjualan Kendaraan Dinas Dan Rumah Golongan III, Angka 1) Kendaraan Perorangan Dinas Huruf E) Pada Alinea <i>Panitia Penjualan Kendaraan Meneliti Dari Segi Administratif/Pemilikan Kendaraan, Keadaan Fisik, Kemungkinan Mengganggu Kelancaran Tugas Dinas, Efisiensi Penggunaannya, Biaya Operasional, Nilai Jual Kendaraan, Persyaratan Pejabat Pemohon Dan Lain-Lain Yang Dipandang Perlu. Hasil Penelitian</i>

	<p><i>Panitia Kendaraan Tersebut Dituangkan Dalam Bentuk Berita Acara, Serta Huruf F) Angka (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah, Persyaratan Administrasi Yang Harus Dipenuhi Yaitu : Hasil Penelitian Panitia Penjualan, Angka 2) Kendaraan Dinas Operasional, Huruf F) Pada Alinea Panitia Penghapusan Alinea Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Meneliti Dari Segi Administratif/Pemilikan Kendaraan, Keadaan Fisik, Kemungkinan Mengganggu Kelancaran Tugas Dinas, Efisiensi Penggunaannya, Biaya Operasional, Nilai Jual Kendaraan, Persyaratan Pejabat Pemohon Dan Lain-Lain Yang Dipandang Perlu. Hasil Penelitian Panitia Kendaraan Tersebut Dituangkan Dalam Bentuk Berita Acara;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 Tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang, Konsideran MEMUTUSKAN, Diktum KEENAM Yaitu Hasil Penelitian Dimaksud Pada Diktum KETIGA, KEEMPAT Dan KELIMA Dituangkan Dalam Bentuk Berita Acara Dan Disampaikan Kepada Bupati Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Kendaraan Dinas Yang Dapat Dijual/Dihapus Dari Daftar Barang Inventaris; - Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2008 Tanggal 8 Oktober 2008 Tentang Kriteria Pemohon Dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang Yang Dapat Dihapus/Dijual Tahun 2008, Bab III Penghapusan Kendaraan Dinas, Pasal 6
--	--

Laporan Penelitian 2013

	<p>Yaitu Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Dimaksud Sudah Diteliti Dan Dibuat Berita Acara Penghapusan Oleh Panitia Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Subang Perorangan Dinas... Dan Pasal 7 pelaksanaan penghapusan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan setelah :</p> <ul style="list-style-type: none">- ayat (1) diadakan penelitian oleh Panitia Kendaraan dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, dihubungkan dengan biaya eksploitasi, persyaratan personil/pegawai pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu- ayat (2) Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
	<p>Terdakwa I selaku Bupati Subang dalam membuat dan menandatangani Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 Tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang, dimana SK berikut lampirannya hanya berdasarkan laporan lisan dari Terdakwa II dan langsung dtandatangani oleh Terdakwa I tanpa terlebih dahulu menanyakan apakah panitia sudah melakukan proses penelitian yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Terdakwa I dalam menandatangani SK beserta lampirannya, hal tersebut menyimpang dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

	<p>Milik Daerah, Angka XI, Angka 5. Pada Alinea <i>Selanjutnya Pengelola Mengajukan Permohonan Persetujuan Kepada Kepala Daerah Mengenai Rencana Penghapusan Barang Dimaksud Dengan Melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Penghapusan</i>, Dan Angka XII, Angka 3 Penjualan Tukar Menukar, Pada Alinea <i>Motivasi/Pertimbangan Lainnya Yakni : Huruf F Penjualan Kendaraan Dinas Dan Rumah Golongan III, Angka 1) Kendaraan Perorangan Dinas Huruf E) Pada Alinea Panitia Penjualan Kendaraan Meneliti Dari Segi Administratif/Pemilikan Kendaraan, Keadaan Fisik, Kemungkinan Mengganggu Kelancaran Tugas Dinas, Efisiensi Penggunaannya, Biaya Operasional, Nilai Jual Kendaraan, Persyaratan Pejabat Pemohon Dan Lain-Lain Yang Dipandang Perlu. Hasil Penelitian Panitia Kendaraan Tersebut Dituangkan Dalam Bentuk Berita Acara</i>, Serta Huruf F) Angka (1) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah, Persyaratan Administrasi Yang Harus Dipenuhi Yaitu : - Hasil Penelitian Panitia Penjualan, Angka 2) Kendaraan Dinas Operasional, Huruf F) Pada Alinea <i>Panelita Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Meneliti Dari Segi Administratif/Pemilikan Kendaraan, Keadaan Fisik, Kemungkinan Mengganggu Kelancaran Tugas Dinas, Efisiensi Penggunaannya, Biaya Operasional, Nilai Jual Kendaraan, Persyaratan Pejabat Pemohon Dan Lain-Lain Yang Dipandang Perlu. Hasil Penelitian Panitia Kendaraan Tersebut Dituangkan Dalam Bentuk Berita Acara</i>;</p> <p>- Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-</p>
--	---

Laporan Penelitian 2013

	<p>DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 Tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang, Konsideran MEMUTUSKAN, Diktum KEENAM Yaitu Hasil Penelitian Dimaksud Pada Diktum KETIGA, KEEMPAT Dan KELIMA Dituangkan Dalam Bentuk Berita Acara Dan Disampaikan Kepada Bupati Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Kendaraan Dinas Yang Dapat Dijual/Dihapus Dari Daftar Barang Inventaris;</p> <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2008 Tanggal 8 Oktober 2008 Tentang Kriteria Pemohon Dan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang Yang Dapat Dihapus/Dijual Tahun 2008, Bab III Penghapusan Kendaraan Dinas, Pasal 6 Yaitu Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Dimaksud Sudah Diteliti Dan Dibuat Berita Acara Penghapusan Oleh Panitia Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Subang Perorangan Dinas... Dan Pasal 7 pelaksanaan penghapusan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan setelah diadakan penelitian oleh Panitia Kendaraan dari segi administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, dihubungkan dengan biaya eksploitasi, persyaratan personil/pegawai pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu dan Hasil penelitian Panitia Kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
	<p>Terdakwa II melakukan penilaian terhadap kendaraan dinas tidak mempertimbangkan salah satu syarat yang ditetapkan yaitu sudah disiapkan kendaraan penggantinya, dan Terdakwa I tanpa memperhatikan syarat tersebut langsung menandatangani</p>

Laporan Penelitian 2013

	<p>Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008, padahal Terdakwa I mengetahui Pemerintah Kabupaten Subang belum melaksanakan pengadaan kendaraan pengganti, hal tersebut menyimpang dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 64 ayat(3), lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, angka XII, angka 3 penjualan tukar menukar, pada alinea motivasi/pertimbangan lainnya yakni : huruf f penjualan kendaraan dinas dan rumah golongan III, angka 1) kendaraan perorangan dinas, huruf b) dan angka 2) Kendaraan Dinas Operasional, huruf c);- Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2008 Tanggal 8 Oktober 2008 Bab II pasal 3.
	<p>Terdakwa II Dalam Melakukan Penilaian Terhadap Kendaraan Dinas Yang Akan Dihapus Dan Dijual Tidak Memperhatikan Jenis Kendaraan Yang Akan Dihapus Dan Dijual Dimana Terdapat 21 (Dua Puluh Satu) Unit Kendaraan Dinas Jenis Ambulans Yang Merupakan Kendaraan Operasional Khusus Dan Terdakwa I Tanpa Memperhatikan Itu Langsung Menandatangani Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 berikut Lampirannya, padahal diketahui harus memenuhi syarat-syarat khusus dikarenakan ambulan dikategorikan kendaraan dinas operasional khusus, sehingga harus mendapatkan persetujuan khusus dari Terdakwa I selaku Kepala Daerah dan kemudian ditetapkan oleh Pengelola (Sekretaris Daerah), hal tersebut menyimpang dari ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17</p>

Laporan Penelitian 2013

	Tahun 2007 angka XI, angka 5.
	<p>Terdakwa II dalam membuat penilaian harga penjualan kendaraan dinas yang dituangkan dalam lampiran Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I, dengan rumusan perhitungan harga jual yaitu Harga Dasar kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2008 (kolom 8) diprosentasekan dengan Susut sesuai Permendagri No 17 Tahun 2007, selanjutnya prosentase Harga Susut tersebut diprosentasekan lagi dengan hasil prosentase pemeriksaan kondisi fisik kendaraan dinas.</p>
	<p>Rumusan harga jual versi terdakwa II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memasukan komponen prosentase kondisi fisik kendaraan padahal prosentase kondisi fisik kendaraan dipergunakan hanya untuk menjadi pertimbangan Panitia Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Subang dalam menentukan kondisi fisik kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, keadaan fisik kemungkinan menggunakan kelancaran tugas dinas atau tidak ekonomis bila diperbaiki untuk kepentingan dinas, padahal sesuai dengan ketentuan untuk harga kendaraan dinas jika telah berumur 5 (lima) tahun s/d 7 (tujuh) tahun maka harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku dan harga kendaraan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih maka harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku, hal tersebut menyimpang dari :</p> <ul style="list-style-type: none">– Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara Bab II, Pasal 5;

Laporan Penelitian 2013

	<p>– Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, angka XII angka 3 penjualan tukar menukar, pada alinea motivasi/pertimbangan lainnya yakni : huruf f penjualan kendaraan dinas dan rumah golongan III, angka 1) kendaraan perorangan dinas, huruf f) angka (1);</p>
	<p>Terdakwa I dalam menetapkan penilaian harga penjualan kendaraan dinas kepada pemohon sebagaimana lampiran Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I, dengan rumusan perhitungan harga jual (kolom 12) yaitu Harga Dasar kendaraan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2008 (kolom 8) diprosentasekan dengan Susut sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 (kolom 10), selanjutnya dari prosentase Harga Susut tersebut diprosentasekan lagi dengan hasil prosentase pemeriksaan kondisi fisik kendaraan dinas (kolom 11).</p> <p>Rumusan harga jual versi terdakwa II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memasukan komponen prosentase kondisi fisik kendaraan padahal prosentase kondisi fisik kendaraan dipergunakan hanya untuk menjadi pertimbangan Panitia Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Subang dalam menentukan kondisi fisik kendaraan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, keadaan fisik kemungkinan menggunakan kelancaran tugas dinas atau tidak ekonomis bila diperbaiki untuk kepentingan dinas, padahal sesuai dengan ketentuan untuk harga kendaraan dinas jika telah berumur 5 (lima) tahun s/d 7 (tujuh) tahun maka harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku dan harga kendaraan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau</p>

Laporan Penelitian 2013

	<p>lebih maka harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku, hal tersebut menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Bab II, Pasal 5;</p> <p>Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, angka XII angka 3 penjualan tukar menukar, pada alinea motivasi/pertimbangan lainnya yakni : huruf f penjualan kendaraan dinas dan rumah golongan III, angka 1) kendaraan perorangan dinas, huruf f) angka (1);</p>
	<p>Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : LHAI-9476/PW10/5/2009 tanggal 14 Desember 2009 dengan kesimpulan pelaksanaan kegiatan tahun 2008 tersebut yang terdiri dari 140 (seratus empat puluh) unit kendaraan roda empat dan 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) unit roda dua yang seluruhnya sebesar Rp. 2.143.125.160,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.143.814.840,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);</p>
	<p>Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit mobil Terano GR tahun 2003 warna hitam No. Pol T-562-T dan Terdakwa II 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang tahun 2003 no.pol T-349-T</p>

C. Dasar Hukum yang Digunakan

1. Dasar Hukum yang Digunakan JPU dalam surat dakwaan:

PRIMAIR

Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Pasal 3 jo.pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Dasar Hukum yang digunakan JPU dalam surat tuntutan:

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Dasar Hukum yang digunakan Penasihat Hukum

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Dasar Hukum yang digunakan Hakim PN, Hakim PT dan Hakim MA

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

I. 1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung

- Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;
- Alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair telah tepat dan benar dengan beberapa perbaikan;
- Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair;
- Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pemahaman Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut unsur setiap orang pada pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan dikotomi (pemisahan) yang tegas dengan menyatakan ... karena para Terdakwa statusnya sebagai pegawai negeri dan didakwa telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kewenangannya, jabatannya, maka alamat yang dituju/sasaran jelas berbeda antara setiap orang yang berada dalam kewenangan, jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 dengan Setiap Orang pada umumnya seperti yang ada didalam pasal 2 ayat 1,...dst

sebagaimana dalam salinan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung halaman 47 alinea akhir dan halaman 48 alinea ke 1 dan ke 4;

- Pengadilan Tinggi berpendapat pengertian setiap orang dalam rumusan pasal 2 ayat (1) adalah sama dengan pengertian setiap orang dalam rumusan pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu sebagai siapa saja subjek hukum orang perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa membedakan apakah orang tersebut berstatus pegawai negeri atau swasta;
- Pengertian unsur setiap orang yang ditujukan terhadap pegawai negeri dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ditentukan melalui 2 (dua) cara :

Pertama dengan menyebutkan sebagai subjek hukum pada orang umumnya, artinya tidak disebutkan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya dengan perkataan setiap orang misalnya pasal 2,3,21,22. Penyebutan subjek hukum pidananya juga dapat ditemui ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6;

Kedua dengan menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pribadi pelakunya seperti : pegawai negeri/penyelenggara negara pada pasal 8,9,10,11,12 huruf a,b,e,f,g,h dan i. Pemborong ahli bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a. Hakim pada pasal 12 huruf c. Advokat pada pasal 12 huruf d. Saksi pada pasal 24 dan Tersangkapun dapat menjadi subjek hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 jo 28;

- Berdasarkan analisa tersebut maka unsur setiap orang dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Terhadap unsur perbuatan melawan hukum pada dakwaan primair Pengadilan Tinggi berpendapat sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang terdapat dalam rumusan pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan dakwaan subsidair Penuntut Umum in casu;
- Pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair, pengadilan Tinggi telah menilai tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali menyangkut pertimbangan terhadap penjatuhan pidana penjara, denda dan kurungan pengganti dendanya;
- Terhadap dalil keberatan pada Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa I tertanggal 27 Juli 2011 dan dalil keberatan pada memori banding dan kontra memori banding Pribadi Terdakwa II tertanggal 18 Juli 2011 dan Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa II tertanggal 01 Agustus 2011 pada dasarnya telah dikemukakan pada keberatan (eksepsi) dan pada nota pembelaan (peldoi) Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tertanggal 4 April 2011 dan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tertanggal 23 Juni 2011 demikian juga tentang penerapan hukum acara dipersidangan, penilaian terhadap alat bukti serta penafsiran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pembuktian unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa Perkara ini;

- Terhadap dalil keberatan pada Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2011 pada prinsipnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan masyarakat dan menyangkut uang pengganti dikehendaki Penuntut Umum sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2011;
- Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan dimasyarakat demikian juga tentang hukuman denda serta pidana kurungan pengganti dendanya harus diperbaiki, terhadap uang pengganti Pengadilan tinggi menilai pertimbangan hukum Pengadilan Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;
- Kerugian negara sebesar Rp. 1.143.814.840,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut adalah jumlah yang cukup besar dan dinilai tidak sepadan dengan hukuman pidana penjara, denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan memperhatikan pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa adalah pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sebagai panutan untuk mengembangkan, memelihara dan melaksanakan kebijakan anti korupsi yang efektif;

- Para Terdakwa sebagai pejabat publik dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah, mengurangi dan menghambat kelancaran pelayanan terhadap kepentingan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa;
- Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

I. 2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI

- Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.W8.EY.PK.01.01.1774/2011 dan No. 04/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2011 dan tanggal 23 September 2011, Para

Terdakwa I, II masing-masing mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

- Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung pada tanggal 06 Oktober 2011;
- Memperhatikan memori Kasasi tanggal 13 September 2011 dari Terdakwa I dan memori kasasi tanggal 06 Oktober 2011 dari kuasa Terdakwa II yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai para pemohon kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung masing-masing pada tanggal 15 September 2011;
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2011 serta memori kasasinya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Bandung pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 09 September 2011 dan para terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2011 serta memori kasasi diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung pada tanggal 15 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

- Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusan tidak mempertimbangkan salah satu alat bukti yaitu alat bukti surat laporan hasil audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi penghapusan/penjualan kendaraan bermotor milik pemerintah Kabupaten Subang tahun anggaran 2008 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat Nomor : LHAI-9476/W10?5/2009 tanggal 14 Desember 2009 .
2. Bahwa Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangan amar putusannya judex facti halaman 29 yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan di masyarakat, namun dalam amar putusannya khusus uang pengganti judex facti hanya membebankan kepada terdakwa II saja dan itupun hanya sebesar Rp. 12.052.800,- (dua belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sedangkan untuk terdakwa I tidak dibebankan uang pengganti karena terdakwa I melalui istrinya sudah menyetorkan kerugian negara kepada Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga bertentangan dengan pertimbangan sendiri terhadap kerugian negara yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada para terdakwa judex facti hanya menghitung kerugian negara terhadap kendaraan dinas yang dibeli oleh para terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan kemana sisa kerugian negara akan dibebankan atau menjadi beban siapa sisanya?

Bahwa adanya perbedaan pendapat judex facti dalam amar putusannya terhadap penilaian besarnya kerugian negara yang

timbul dan beban kerugian negara yang harus ditanggung oleh para terdakwa tidak mencerminkan suatu kepastian hukum, demikian juga mengenai penerapan pidana penjara pengganti uang pengganti hanya dijatuhkan kepada terdakwa II saja selama 2 (dua) bulan, amar putusan tersebut dirasakan sangat rendah dan tidak akan mempengaruhi sikap batin terdakwa;

Bahwa salah satu prinsip penegakan hukum tindak pidana korupsi selain mempidanakan para pelaku agar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memperingatkan pihak lain atau masyarakat untuk tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi yang sangat penting yang lainnya juga adalah recovery asset (pengembalian uang negara);

3. Bahwa Judex facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya tidak mencerminkan semangat prinsip recovery asset (pengembalian kerugian keuangan negara), sehingga menjadi sia-sia penuntutan yang telah pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum lakukan, dengan demikian menolak putusan judex facti khususnya mengenai pembebanan uang pengganti kerugian negara kepada para terdakwa;

Bahwa pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat seharusnya judex facti memutuskan pembebanan kerugian negara kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.143.814.840,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) karena akibat perbuatan para terdakwa yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, oleh karenanya para terdakwa wajib untuk mengganti kerugian negara tersebut dengan perincian terdakwa I sebesar Rp. 548.527.420,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 571.097.420,- (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika

tidak membayara uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

- Bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan aturan hukum dasar pemidanaan dan dasar dari putusan serta keadaan yang meberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai dengan pasal 197 ayat (1) f KUHAP dan *judex facti* telah mempertimbangkan jumlah uang pengganti kepada para terdakwa sesuai alat bukti yang sah di persidangan;

Mengenai alasan ke-3

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981)

- Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa *Judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya “

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, oleh karena itu menolak pertimbangan judex facti dalam putusan pada halaman 53 yang menyatakan “ menimbang bahwa ada beberapa teori tentang kesengajaan yakni : kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), mempunyai pengertian bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya akan kemungkinan akibat yang timbul dari suatu perbuatan, namun tetap dilakukan walaupun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang ada, yang akhirnya akibat itu benar-benar terjadi dan majelis berpendapat dalam kasus ini teori tersebut dapat digunakan”

Terhadap pertimbangan judex facti ini pemohon kasasi II/terdakwa I terlebih dahulu menjabarkan tentang suatu kesengajaan dalam hukum pidana berdasarkan doktrin (pendapat ahli) dalam teori ilmu hukum pidana, pengertian sengaja (opzet) berarti de (bewusfe) richting an den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu), yang artinya bahwa suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai sengaja apabila orang tersebut mempunyai niat atau maksud untuk melakukannya. Kemudian juga dihubungkan dengan willens (menghendaki) dan wetes (mengetahui) dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan.

Juga dijelaskan mengenai 3 (tiga) jenis sengaja secara tradisional :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzef als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
- c. Sengaja dengan sadar kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn);

Selain itu juga dihubungkan dengan pasal 3 UU tindak pidana korupsi tidak secara eksplisit merumuskan kata sengaja, hal ini dihubungkan dengan pendapat Dr. Nur Buki Minarno, SH., MH dalam bukunya Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah terbitan Laksbang mediatama Yogyakarta, tahun 2000, halaman 30. Hal ini diperkuat juga dengan keterangan ahli somawijaya, SH., MH dalam keterangannya di persidangan yang menyatakan untuk pasal 2 dan pasal 3 UU tindak pidana korupsi haruslah unsur subjektif yang berbentuk sengaja/dolus.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa I kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai kelalaian dalam ilmu hukum pidana. Dalam perkara a quo, judex facti memberi pertimbangan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I masuk dalam kategori dolus eventualis. Pemohon Kasasi II/Terdakwa I menjabarkan tentang perbedaan dan persamaan antara dolus eventualis dan kelalaian, dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam penghapuskendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Subang melalui dumb, yang intinya Pemohon Kasasi II/Terdakwa I selaku bupati telah melakukan pendelegasian wewenang dan tugas bupati telah beralih kepada panitia. Hal ini kemudian dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH., MH

2.

3.

- Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

-

II.1 AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKOR BANDUNG

Laporan Penelitian 2013

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana penjara, denda dan hukuman kurungan pengganti dendanya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **MAMAN YUDIA Bin DUDUNG** dan **Terdakwa H.TATUN DARADJATUN,SH,M.Si Bin SUPARMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
 - Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
 - Menyatakan **Terdakwa MAMAN YUDIA Bin DUDUNG** dan **Terdakwa H.TATUN DARADJATUN SH,M.Si Bin SUPARMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” ;
 - Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun ;
 - Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Denda masing masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti masing masing selama : 1 (satu) tahun ;
 - Menghukum Terdakwa Tatun Daradjatun untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.12.052.800,- (dua belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti a Sampai dengan bukti l ;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;
 - Barang bukti m dan n
Dikembalikan kepada Terdakwa I. MAMAN YUDIA bin (Alm) DUDUNG ;
 - Barang bukti o
Dikembalikan kepada saksi Drs.Endang Aminullah,MM ;
 - Barang bukti p
Dikembalikan kepada saksi Drs.H.Rahmat Solihin ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penyetoran kerugian Negara dari isteri Terdakwa I.MAMAN YUDIA Kepada Jaksa Penuntut Umum ;
Dirampas untuk Negara ;
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang untuk tingkat banding masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

II.2 AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;
- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa; **I. MAMAN YUDIA Bin DUDUNG, II. H.TATUN DARADJATUN,SH,M.Si Bin SUPARMAN** tersebut.
- Membebankan Para Terdakwa I dan II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

E. Studi /Kajian Pustaka

Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan sejarah panjang dengan sederetan undang-undang yang dilengkapi pula dengan berbagai Tim/ Komisi Khusus guna menunjang pemberantasan korupsi tersebut, seperti halnya di era reformasi ini muncul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Menurut Blacks Law Dictionary (Garner, Bryan A, 1999 : 348), *Corruption, depravity, perversion, or taint: an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp the impairment of a public official's duties by bribery.* Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan Alwi *et al.*, 2002: 597), Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat peraturan tentang usaha preventif langsung tentang perbuatan korupsi. Peraturan pidana sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut hanya merupakan usaha preventif secara tidak langsung, yaitu agar orang-orang lain tidak atau takut melakukan perbuatan korupsi atau yang bersangkutan (terpidana) jera untuk mengulangi perbuatan korupsinya di kemudian hari. Yang jelas korupsinya telah berlangsung dan tidak mungkin diperbaiki lagi (Andi Hamzah, 2007 : 11).

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Hukum pidana sering dikatakan hukum undang-undang karena terikat dengan asas legalitas. Dalam KUHP asas legalitas dimuat dalam Pasal 1 ayat (1). Adagium yang terkenal dari Ansellem Von Feurbach adalah *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*.

Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dalam perkara pidana lebih sempit ketimbang perkara lainnya, sehingga jalan yang harus ditempuh untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum lebih panjang dari pada perkara lainnya. Tinjauan dari segi formil perlu, berhubungan dengan asas legalitas....” Tinjauan dari segi materiil sebaliknya diperlukan, oleh

karena dengan baru adanya ini, aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti. Pengertian sifat melawan hukum materiel yang dianut dalam yurisprudensi Indonesia, setidaknya-tidaknya dalam perkara korupsi: bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan masyarakat banyak (Moeljatno, 1955: 18-19).

Undang-undang ternyata tidak cukup memuaskan bagi para penegak hukum dan pencari keadilan. Terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, karena itu dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru sebagai hasil menyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan demikian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi telah diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, disebut yurisprudensi (Komariah Emong Sapardjaja, 2002 : 57).

Sifat melawan hukum materiel dalam Yurisprudensi di Indonesia terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.42/K/Kr/1965, dalam perkara Machroes Effendi yang didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusan Perkara No.6/1964/Tolakan, tanggal 24 September 1964, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta dihukum 1 tahun 6 bulan, kemudian dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Perkara No.146/1964 PT Pidana, tanggal 27 Januari 1965, dinyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi. Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pengeluaran-

pengeluaran DO gula insentif padi yang dilakukan terdakwa sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan Terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan, akan tetapi faktor kepentingan umum dilayani, serta faktor tidak adanya keuntungan yang masuk ke dalam saku Terdakwa dan faktor tidak dideritanya kerugian oleh negara, merupakan faktor-faktor yang memiliki nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan Terdakwa, yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana (Dalam Komariah Emong Sapardjaja, 2002 : 137).

Semenjak keluarnya Putusan Mahkamah Agung No.42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966, telah berulang kali kaidah-kaidah tentang sifat melawan hukum yang diciptakannya, dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan bawahan sebagai alasan pembenar, terutama dalam perkara-perkara korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi seringkali dinyatakan tidak terbukti, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Dalam Komariah Emong Sapardjaja, 2002 : 137).

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1971 dan keinginan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih efektif, pada tahun 1980-an Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 15 Desember 1982 No.275K/Pid/1982, menegaskan arti sifat melawan hukum materiil, setidaknya dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu sebagai perbuatan yang karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk hati masyarakat banyak. Putusan itu juga merinci unsur tindak pidana korupsi, yaitu negara dirugikan, kepentingan umum tidak dilayani dan terdakwa mendapat keuntungan. Kaidah inipun telah diikuti oleh beberapa putusan Mahkamah Agung berikutnya untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi (Komariah Emong Sapardjaja, 2002 : 162).

Sifat Melawan Hukum Materiil yang terdapat dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999.

Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999, menyatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Wiyono (2006: 26) menyatakan: ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil. Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu: ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif dan ajaran sifat melawan hukum yang fungsinya negatif. Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Adapun maksud pembuat undang-undang menganut ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif, agar dapat menjangkau berbagai *modus operandi*

penyimpangan keuangan dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Pada tanggal 25 Juli 2006 Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 menyatakan pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti materiil tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat pengertian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ini bertentangan dengan UUUD 1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi dalam Pasal 28 D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan, seperti dalam perkara atas nama Rusadi Kantaprawira tetap menerapkan asas sifat melawan hukum materiil, dengan alasan hakim berdasarkan doktrin *Sens –Clair* Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus menemukan hukum. Selain itu juga Hakim dalam mencari makna melawan hukum, seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik pada saat suatu ketentuan diterapkan pada kasus konkret.

Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Wiyono (2006 : 37) menyatakan, terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, dalam penjelasan Pasal 3 hanya disebutkan kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2. Dengan demikian, untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 3 tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam

penjelasan Pasal 2. Di dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan; “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, bukan timbulnya akibat.” Ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

2. Ajaran Deelneming (penyertaan)

Menurut Hooge Raad untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta adalah turut melakukan, harus ada 2 unsur, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi (*buweste samenwerking*);
- b. Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).

Lamintang (1984 : 588) menjelaskan bentuk *medeplegen* sebagai berikut:

Oleh karena itu di dalam bentuk *deelneming* itu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Dengan demikian, maka *medeplegen* itu disamping merupakan bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan bentuk *daderschap*.

Moeljatno (Dalam A.Z. Abidin dan Andi Hamzah 2002, 190) memberikan contoh Arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 yang terkenal dengan nama *Woemerveers brandstichtingsarrest*, dalam kasus mana peranan-peranan pelaku dua orang peserta dapat berganti (*verwisselbaar*), seorang pelaku peserta memberikan jerami kering kepada seorang pelaku peserta lainnya, yang dengan jerami itu naik ke

loteng gudang dan menyerahkan jerami untuk dipakai membakar gudang. Orang itulah yang melakukan tindak pelaksanaan, sedangkan orang yang pertama hanyalah menyerahkan jerami, yang bukan merupakan perbuatan membakar, tetapi sangatlah penting untuk pelaksanaan pembakaran gudang. Kedua perbuatan itu membuktikan adanya kerja sama yang disadari dan pembagian peranan hanyalah kebetulan berbeda yang sesuai dengan rencana bersama.

3. Pemberlakuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Dalam praktik kerap terjadi penafsiran yang keliru atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Ada hakim yang menafsirkan, bahwa ketentuan Pasal 2 hanya berlaku bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri, sedangkan Pasal 3 subjek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat.

Terhadap kontroversi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Mahkamah Agung telah membuat Rumusan, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2012 : 21).

F. Analisis

1. Analisis putusan dalam kaitannya dengan Aspek Hukum Acara

Tim Peneliti menganalisa kaitannya dengan Aspek Hukum Acara dilihat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU No. 8 tahun 1981.

1.1. Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah memuat secara lengkap hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.
- 1.2. Terkait pertanyaan poin 1.1, putusan tersebut secara formal telah sah (tidak cacat atau batal) karena putusan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat surat putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.
- 1.3. Putusan hakim PN sudah didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa. Saksi *a charge* berjumlah 24 (dua puluh empat) orang di samping itu Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang ahli. Saksi *a charge* tersebut adalah, Drs.Rahmat Setiawan, Drs.H.Endang Aminullah, M.M., KoestoyoWiguna, SH., Msi, Drs. H. Rahmat Solihin , Bebet Sulaiman, Endang Herdiana, SE, Msi,Drs.A.Lugaya Mukhtar, Msi , Ahmad Sobari, S.Sos, Ubi Kartubi, A.Ks., MSi, Hasyim Amd, Abe Albert Huka, Toto Heryanto, Ana Daryana, Dadan Sukmayadi, M. Natsir Zen, Suhendi, Tony Kusumah, Usman Efendi, Kamal Ma'ruf, Rahmat Mulyono, SE, Drs. H. Suryana Efendi, Indra Suparman, SH, Suangsih dan Abdul Wahab Syahroni. Sedangkan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah, Uus Sundawan, SE, AK, MM dan Hanafi Ruchyati, SH, MM. Sedangkan Pihak Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yaitu, Besta dan Kormet Bastaman dan 2 (dua) orang ahli, yaitu : Prof.Dr.I.Gede

Pantja Astawa, S.H.,M.H. dan Somawijaya, SH, MH. Dengan demikian maka Putusan *aquo* telah memenuhi Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP;

- 1.4. Untuk pemeriksaan/ penilaian alat bukti Majelis Hakim menggunakan doktrin dan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara, putusan Hoge Raad 25 Juni 1894, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, Putusan No. 1530 K/PID/1995, tanggal 30 Januari 1996, Prof. Andi Hamzah, Prof Romli Atmasasmita, Prof Soedarto, Kerugian Negara, dalam perspektif Hukum Administrasi Publik, masalah dan penyelesaiannya oleh Drs. A.Y Suryanajaya, SH.MH Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kdudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan No. Pol. : Kep/12/IV/2002 tgl 29 April 2002 dan No. : Kep.04.02.00-219/K/2002, tgl 29 April 2002 tentang

Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana sebagai dasar penilaian terhadap perbuatan para terdakwa dan penjatuhan hukuman;

Rangkuman:

Secara formalitas putusan Hakim Tingkat pertama telah sah (memenuhi syarat), karena telah memuat seluruh isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

2. Analisis putusan dalam kaitannya dengan Aspek Hukum Material

2.1. Putusan tersebut mencantumkan secara tegas surat dakwaan dan surat tuntutan, yaitu surat dakwaan berbentuk dakwaan subsidairitas terdapat pada halaman 5 sampai dengan halaman 25 Putusan *aquo* dan tuntutan pidana sebagaimana surat tuntutan terdapat pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 Putusan *aquo*.

2.2. Putusan memuat pertimbangan hukum yang tidak memadai terkait dasar dakwaan karena hakim mendasarkan pada :

- a. Pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas bersifat umum;
- b. Maksud setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bersifat umum, yaitu siapa pun orang itu terlepas apakah pelaku tindak

pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

- c. Sedangkan setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang mempunyai sifat khusus bila dibanding dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan atau kewenangan pada orang dimaksud;
- d. Pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dengan unsur melawan hukum yang bersifat umum pula;
- e. Sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, Tempat, dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;
- f. Berhubung Para Terdakwa menduduki suatu jabatan atau kedudukan sebagai Bupati Subang dan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang sekaligus selaku pengguna anggaran dan mempunyai wewenang untuk melakukan pelepasan aset daerah, maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat sifat/ karakteristik khusus

sebagai orang perseorangan yang karena jabatan atau kedudukan atau kewenangan sebagai Bupati Subang dan Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana termaktub dalam pengertian setiap orang menurut Pasal 3 yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian maka unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi diri Para Terdakwa. Selanjutnya Majelis menyatakan yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut hemat Tim Peneliti pertimbangan Majelis tersebut sangatlah keliru karena apabila pola pikir tersebut diterapkan dalam perkara korupsi akan timbul permasalahan sbb:

- a. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi tidak dapat dijerat oleh Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal unsur barang siapa dalam Pasal 2 tersebut di atas berlaku umum terhadap siapa saja baik Pejabat Negara, PNS, atau bukan PNS;

- b. Apabila Pejabat Negara atau PNS hanya dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selama-lamanya ancaman hukuman bagi Pejabat Negara atau PNS yang melakukan tindak pidana korupsi akan lebih rendah daripada ancaman hukuman bagi non-PNS. Ancaman hukuman dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman hukuman dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana mati. Sedangkan ancaman hukuman dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- c. Dalam perkara No.10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang sedang diteliti ini Majelis Hakim Tingkat I menjatuhkan vonis bagi Terdakwa I Maman Yudia dan Terdakwa II H. Tatun Daradjatun, SH., Msi, dengan ancaman hukuman terendah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- d. Pola pikir Majelis Hakim dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas-jelas keliru, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dalam jabatan justru ancamannya lebih berat, contoh tindak pidana penggelapan yang berlaku umum diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun penjara, sedangkan penggelapan dalam jabatan ancaman hukumannya maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, dengan demikian penafsiran restriktif terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut adalah keliru;
- e. Menurut Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI 2012, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2

maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.

2.3. Terdapat konsep-konsep hukum tertentu (utama/kunci) yang menjadi isu sentral dalam pertimbangan putusan tersebut, yaitu tentang penafsiran terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Majelis Hakim Tingkat I menggunakan doktrin yaitu pendapat Prof.Dr.Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Namun Majelis Hakim dalam mengutip doktrin dari pendapat Prof. Dr.Romli Atmasasmita dan Prof. Dr. Andi Hamzah tersebut tidak memuat dari mana sumber pendapat tersebut dikutip.

2.4. Dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2008 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005, Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan No. Pol.

: Kep/12/IV/2002 tgl 29 April 2002 dan No. : Kep.04.02.00-219/K/2002, tgl 29 April 2002 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana. Majelis hakim juga menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1530 K/PID/1995, tanggal 30 Januari 1996 dan putusan Hoge Raad 25 Juni 1894, selainitu Majelis Hakim jugamenggunakan doktrin dari Prof. Dr.Romli Atmasasmita, Prof. Dr. Andi Hamzah dan Soedartomeskipun tidak menyebutkan dari manasumber doktrin tersebut diambil, Drs. A.Y Suryanajaya, SH.MH dalam buku Kerugian Negara, Dalam Perspektif Hukum Administrasi Publik, Masalah Dan Penyelesaiannya

Rangkuman:

Kendati Majelis Hakim memuat secara lengkap surat dakwaan dan surat tuntutan dalam putusannya, juga menggunakan konsep-konsep hukum tertentu dan yurisprudensi dalam pertimbangan hukumnya. Namun hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk mengukur benar/ adil tidaknya putusan, apabila penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah keliru, yaitu dengan mempersempit unsur seseorang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Intinya Majelis Hakim merumuskan bahwa Pasal 2 tidak dapat diterapkan bagi Pejabat/PNS, sehingga Pejabat/ PNS hanya dapat dijerat oleh Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Analisis putusan dalam kaitannya dengan Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

3.1. Amar putusan (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan tidak sesuai dengan filosofi dasar hukum terkait dengan perkara tersebut karena dalam amar putusan Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, hal tersebut tidaklah tepat, sebagaimana analisis butir 2.2. tersebut di atas. Di samping itu sanksi pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan sanksi minimal, yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal tersebut bertentangan dengan filosofi penjatuhan pidana karena sanksi pidana terlalu singkat adalah terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

3.2. Jenis dan bobot sanksi dalam putusan tidak sesuai dengan perbuatan hukum Para Terdakwa yang dengan jelas-jelas tidak mematuhi dan mengikuti prosedur dan tata cara pelaksanaan pelepasan asset milik daerah serta melakukan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh negara, hal ini dapat jelas terlihat dengan tidak dilibatkannya Panitia Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang dan Sekretariat Tim Teknis Administrasi dan Fisik Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 024/KEP.373-PLK/2008 tentang Pembentukan Panitia Penjualan kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang beserta lampirannya. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang

dipertimbangkan oleh hakim adalah hal-hal yang tidak prinsip dan tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal lain yang kemungkinan akan menyebabkan adanya pemahaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dapat dijerat oleh pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sehingga tidak lagi mempedulikan norma dan tatanan hukum selaku aparat negara. Menurut hemat Peneliti hal tersebut tidak mencerminkan penegakan keadilan yang sesuai bagi semua pihak, dikarenakan seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai aparat penyelenggara negara;

3.3. Amar Putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan hal ini terkait dengan tidak dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Terdakwa, sedangkan dalam perkara *a quo* terlihat jelas kesalahan sepenuhnya ada pada pihak Terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum dan kemanfaatan secara umum tidak diperoleh semua pihak dalam perkara ini. Majelis mempertimbangkan di satu hal bahwa Para terdakwa karena kedudukan dan jabatannya seharusnya menggunakan kewenangannya dengan baik sebagaimana dalam halaman 61 putusan dan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja dan pengabdianya seharusnya memahami mengenai proses pelaksanaan pelepasan dan penjualan asset daerah sebagaimana dalam putusan halaman 64 akan tetapi di satu sisi majelis berpendapat Para Terdakwa sebagai pegawai Negeri Sipil dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan sebagaimana halaman 66 putusan. Hal ini

jelas-jelas bertolak belakang dengan maksud pembuktian perbuatan para terdakwa tersebut.

Rangkuman:

Penjatuan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan alasan terhadap Pegawai Negeri sipil tidak dapat diterapkan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mencerminkan pertimbangan tentang rasa keadilan terhadap akibat yang luar biasa terhadap tatanan bernegara. Dengan memberikan putusan minimal dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan sanksi minimal, yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jelas-jelas tidak akan menimbulkan efek jera.

4. Analisa putusan dalam kaitannya dengan Aspek Penalaran Hukum

- 4.1. Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap unsur Setiap Orang, menyatakan menganalisa tentang subyek dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dari sejarah

pembentukannya yang berkaitan dengan ancaman hukuman yang berbeda sehingga Pegawai Negeri diposisikan sebagai pihak yang terpojok untuk menyalahgunakan kewenangan dibanding pihak swasta. Hal ini merupakan penafsiran dalam memberikan penalaran hukum yang keliru, dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memandang Setiap Orang itu adalah siapa pun orang itu terlepas apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, maka secara filosofi serta tujuan pembedaan tidak terpenuhi yaitu untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku;

4.2. Argumentasi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya tidak menunjukan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya. Majelis Hakim mempertimbangkan aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah sebagaimana tertera dalam halaman 44 putusan perkara *a quo*. Serta fakta-fakta dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertimbangkan oleh hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama akan tetapi dalam memberikan konklusinya tidak memperlihatkan tujuan pembedaan untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

- 4.3. Tim peneliti dalam meneliti putusan tidak menemukan adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*.

Rangkuman:

Pemahaman dan penafsiran hakim terhadap isi pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan penalaran yang keliru dan pemahaman inilah yang menjadi dasar pemberian sanksi minimal kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berbagai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa baik secara teori maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini memperlihatkan dan membuktikan adanya perbuatan para Terdakwa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku terhadap prosedur Penghapusan/Penjualan Kendaraan Bermotor/Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang, hanya kemudian dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim berpendapat lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan sanksi minimal sebagaimana ancaman hukum dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

G. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

1. Secara formalitas putusan Hakim Tingkat pertama telah sah (memenuhi syarat), karena telah memuat seluruh isi dari Pasal 197 ayat (1) KUHP.
2. Kendati Majelis Hakim memuat secara lengkap surat dakwaan dan surat tuntutan dalam putusannya, juga menggunakan konsep-konsep hukum tertentu dan yurisprudensi dalam pertimbangan hukumnya. Namun hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur benar/ adil tidaknya putusan, apabila penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah keliru, yaitu dengan mempersempit unsur seseorang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Intinya Majelis Hakim merumuskan bahwa Pasal 2 tidak dapat diterapkan bagi Pejabat/PNS, sehingga Pejabat/ PNS hanya dapat dijerat oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan alasan terhadap Pegawai Negeri sipil tidak dapat diterapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mencerminkan pertimbangan tentang rasa keadilan terhadap akibat yang luar biasa terhadap tatanan bernegara. Dengan memberikan putusan minimal dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan sanksi minimal, yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jelas-jelas tidak akan menimbulkan efek jera.

4. Pemahaman dan penafsiran hakim terhadap isi pasal Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan penalaran yang keliru dan atas dasar pemahaman inilah yang menjadi dasar pemberian sanksi minimal kepada Para Terdakwa.

REKOMENDASI

1. Majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana korupsi seharusnya mempertimbangkan segala aspek yang ada secara lebih mendalam, sehingga dapat menjadikan cerminan keadilan dan tidak memberikan putusan yang dapat mencederai rasa keadilan.
2. Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum tidak semata-mata Majelis Hakim hanya menegakan peraturan-peraturan yang berlaku, sebaiknya juga melakukan penggalian terhadap kaidah-kaidah, norma-norma dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat.
3. Dengan adanya penerapan dan pemahaman yang keliru terhadap Setiap Orang yang dipahami oleh Majelis Hakim bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dikenakan dengan ancaman Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebabkan Majelis Hakim memberikan putusan dengan sanksi minimal, sudah seharusnya tidak dipakai sebagai acuan dalam pemberian putusan dalam tindak pidana korupsi. Pemahaman tersebut tidak pula dilandasi dengan doktrin yang jelas hanya menyebutkan nama orang tanpa menjelaskan lebih rinci darimana sumber doktrin tersebut sehingga patut dipertanyakan keabsahan dari doktrin tersebut.

4. Dalam pendidikan hakim hendaknya ada pelatihan pertimbangan putusan dengan menggunakan penalaran hukum yang logis dan sistematis agar para Hakim bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.

H. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2002, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, .Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Garner, A Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, St Paul, Minn.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2012, *Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*),

Laporan Penelitian 2013

Alumni, Bandung.

Myrdal, Gunnar, 1977, *Asian Drama an Inquiry into the Poverty Of Nation*,

Penguin Books Australia Ltd.

Podgor, Ellen S., *White Collar Crime*, 1993, St. Paul Minn, Whest

Publishing Co.

Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

-----, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Utrecht, 1962, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung.

Wattimena, Reza A.A, 2012, *Filsafat Anti-Korupsi*, Kanisius, Yoyakarta.

Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

LAMPIRAN I

PANDUAN PERTANYAAN PENELITIAN PUTUSAN TAHUN 2013

1. Aspek Hukum Acara

1.1. Apakah putusan hakim telah memenuhi struktur/unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum acara (misalnya Pasal 197 dan/atau 199 KUHAP, Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBG)?

- ☒ Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

1.2. Apakah putusan tersebut telah sah (tidak cacat atau batal)

- ☒ Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

1.3. Apakah putusan hakim sudah didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum acara (misalnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP)?

- ☒ Ya
- b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

1.4. Adakah sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang (misalnya doktrin dan/atau yurisprudensi) yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim melakukan pemeriksaan/penilaian alat bukti?

☒ Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

2. Aspek Hukum Material

2.1. Apakah putusan tersebut mencantumkan secara tegas (eksplisit) dasar gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak?

☒ Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

2.2. Apakah putusan memuat pertimbangan hukum yang memadai terkait dasar gugatan/tuntutan/permohonan yang diajukan para pihak?

a. Ya

☒ Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

2.3. Adakah konsep-konsep hukum tertentu (utama/kunci) yang menjadi isu sentral dalam pertimbangan putusan tersebut?

☒ Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

2.4. Terkait pertanyaan poin 2.3, adakah dasar hukum selain undang-undang, yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan tersebut?

- ☒ Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

3. Aspek Filosofi Penjatuhan Putusan

- 3.1. Apakah amar putusan (jenis dan bobot sanksi) yang dijatuhkan telah sesuai dengan filosofi dasar hukum terkait dengan perkara tersebut?
 - a. Ya
 - ☒ Tidak
 - c. Tidak Teridentifikasi
- 3.2. Apakah jenis dan bobot sanksi dalam putusan telah sesuai dengan perbuatan hukum, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang dipertimbangkan oleh hakim?
 - a. Ya
 - ☒ Tidak
 - c. Tidak Teridentifikasi
- 3.3. Apakah nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sudah diperoleh semua pihak dalam perkara ini?
 - a. Ya
 - ☒ Tidak
 - c. Tidak Teridentifikasi

4. Aspek Penalaran Hukum

- 4.1. Apakah dapat ditemui adanya keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut?
 - a. Ya
 - ☒ Tidak
 - c. Tidak Teridentifikasi

4.2. Apakah argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya?

a. Ya

☒ b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

4.3. Apakah dalam putusan tersebut ditemukan adanya penemuan hukum? Jelaskan jenis penemuan hukum dan rumusannya dalam putusan!

a. Ya

☒ b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Laporan Penelitian 2013

LAMPIRAN II

**Tabel Indikasi terjadinya Disparitas secara horisontal
(sesame putusan pengadilan tingkat pertama)**

No.	Sub No.	PN 1			PN 2			PN 3			PN 4			PN 5			CatatanDisparitas
		ya	tdk	tt	Ya	tdk	tt	ya	tdk	tt	ya	tdk	tt	ya	tdk	tt	
1	1.1				√												
	1.2				√												
	1.3				√												
	1.4				√												
2	2.1				√												
	2.2					√											
	2.3				√												
	2.4				√												
3	3.1					√											
	3.2					√											
	3.3					√											
4	4.1				√												
	4.2				√												

Laporan Penelitian 2013

	4.3		√				
--	-----	--	---	--	--	--	--

LAMPIRAN III

RANGKUMAN PUTUSAN:

Nomor Perkara Pengadilan Negeri

: 10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg

Nomor Perkara Pengadilan Tingkat Berikutnya (PT/MA)

: 31/TIPIKOR/2011/PT.BDG dan 2104K/Pid.Sus/2011

No.	Dasar Hukum Penuntutan	Nama-nama Majelis Hakim PN	Tgl mulai sidang s.d. putusan	Nama Terdakwa	Maks. Sanksi menurut UU	Tuntutan menurut JPU	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI		Pokok-pokok pertimbangan Hakim PN
							Bunyi Amar Putusan PN	Sanksi Putusan PN	
1	Pasal 3 jo.pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan	Ketua Singgih Budi Prakoso, SH., MH Anggota H. Ramlan Comel, SH Iskandar Harun, SH	14 Maret 2013 sampai dengan 23 Juni 2013	Maman Yudia Bin Alm. Dudung H.Tatun Daradjatun, SH,MSi	Pidana penjara20 (dua puluh tahun) dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.00 0.000,- (satu miliar rupiah)	Pasal 3 jo.pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberant asan tindak pidana korupsi,seb agai mana telah diubah dan ditambah	- Menyatakan Terdakwa MAMAN YUDIA Bin DUDUNG dan Terdakwa H.TATUN DARADJATUN,SH,M.S i Bin SUPARMAN , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ; Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;	Pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun	- Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana dalam dakwaan primair, oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan

Laporan Penelitian 2013

tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;					dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;	Menyatakan Terdakwa MAMAN YUDIA Bin DUDUNG dan Terdakwa H.TATUN DARADJATUN SH,M.Si Bin SUPARMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ; Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun ; Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Denda masing masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan		primair - Unsur setiap orang terpenuhi untuk pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, dikarenakan
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

							<p>pengganti masing masing selama : 1 (satu) bulan ; Mengkukum Terdakwa Tatun Daradjatun untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.12.052.800,- (dua belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti ma diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;</p>		<p>Para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil</p> <p>- Pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang artinya pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya itu, begitu pula akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

							<p>Menetapkan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Bupati Subang Nomor : 024 KEP.373-PLK/2008, tanggal 8 September 2008, tentang pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan bermotor/perorangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Subang ;</p> <p>b. 16 (enam belas) lembar fotocopy Keputusan Bupati Subang Nomor : 028/Kep.458-DPPKAD/2008, tanggal 17 Nopember 2008, tentang penghapusan/penjualan kendaraan</p>		<p>- Pengertian “menguntungkan” yang lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas.</p> <p>- Dari nilai barang yang dijual</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

							<p>bermotor/perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang ;</p> <p>c. 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2008, tanggal 08 Oktober 2008, tentang kriteria pemohon dan kendaran perorangan Dinas Milik Pemda Kab.Subang yang dapat dihapus/dijual tahun 2008 ;</p> <p>d. 305 (tiga ratus lima) lembar bukti pembayaran dari pembeli kendaraan R-2 kepada bendahara penerima DPPKAD ;</p> <p>e. 163 (seratus enam tiga) lembar bukti pembayaran dari pembeli kendaraan R-4 kepada bendahara penerima DPPKAD ;</p>		<p>harganya menurut BPKP terlalu rendah sehingga menimbulkan keuntungan baik diri sendiri yakni karena Para Terdakwa termasuk pembeli maupun kepada orang lain, dikarenakan adanya perbedaan rumus yang digunakan oleh Para terdakwa tidak sesuai , bahwa Penilaian barang milik</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

							<p>f. 139 (seratus tiga sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian teknis kendaraan bermotor (kendaraan roda empat) ;</p> <p>g. 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian teknis kendaraan bermotor (kendaraan roda dua) ;</p> <p>h. 6 (enam) lembar rekapitulasi hasil pemeriksaan/penilaian kendaraan (dumb) kendaraan roda 4 (empat) ;</p> <p>i. 9 (Sembilan) rekapitulasi hasil pemeriksaan/penilaian kendaraan (dumb) kendaraan roda 2 (dua) ;</p> <p>j. 7 (tujuh) lembar daftar honorarium kegiatan</p>		<p>daerah tersebut diatas rumus yang digunakan adalah “HARGA PEROLEHAN” bukan “HARGA DASAR” berdasar PERGUB JABAR, sehingga wajar apabila KONDISI FISIK kendaraan masih diperhitungkan, akan tetapi rumus yang digunakan dalam SK Bupati</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

							<p>penghapusan asset barang daerah Dinas endapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah Kab.Subang ;</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopy memo Bupati Subang kepada Sekda tertanggal 17 Nopember 2008 ;</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Kepala DPPKAD Kabupaten Subang Drs.H.ALUGAYA MUKHTAR, M.Si kepada Bupati Subang perihal penanda tanganan Naskah Surat Keputusan Bupati Subang ; Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;</p> <p>m. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Nissan Terano GR tahun 2003 dengan No.Pol.T</p>		<p>tersebut diperhitungkan HARGA DASAR berdasar PERGUB JABAR kemudian masih dikurangkan dengan Kondisi Fisik (%);</p> <p>- Para Terdakwa seharusnya menyadari bahwa kemungkinan akibat akan terjadi baik menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dan kerugian</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

							<p>562 T, an.Pemerintah Kab.Subang Noka WD21-M66177 Nosin Z24-956359Y (No.Pol. awal T 5 T) ;</p> <p>n. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No0339576/JB/2009 tanggal 24 Juli 2009 ;</p> <p>Dikelmbalikan kepada Terdakwa I. MAMAN YUDIA bin (Alm) DUDUNG ;</p> <p>o. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota KF 70 Tahun 2003 jenis Mini Bus No.Pol.T-1827 UR (No. Pol awal sebelum balik nama T 341 T kendaraan tersebut sebelumnya milik Pemerintahan Kab.Subang) No. Rangka MHF11KF7030040288,</p>		<p>yang timbul, walaupun tidak dikehendaki akan tetapi tetap saja dilakukan sehingga akibat itu akhirnya juga terjadi</p> <p>- Terdakwa Maman Yudia Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai Bupati Subang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

							<p>Nosin 7K0594032 ; Dikembalikan kepada saksi Drs.Endang Aminullah,MM ;</p> <p>p. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota KF 70 Tahun 2003 Jenis Mini Bus No.Pol.T 1183 TD (No.Pol awal sebelum balik nama T 378 T kendaraan tersebut sebelumnya milik Pemerintahan Kab.Subang) No. Rangka MHF11KF7030040540 Nosin 7-K0011237 ; Dikembalikan kepada saksi Drs.H.Rahmat Solihin ;</p> <p>q. Uang tunai sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penyetoran kerugian Negara dari</p>		<p>Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32-736 tahun 2008 tanggal 18 September 2008 dan jabatan sebelumnya sebagai wakil bupati Subang, dan Terdakwa Tatan Daradjatun Pegawai Negeri Sipil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Perlengkapan pada Setda Kabupaten</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

							<p>isteri Terdakwa I.MAMAN YUDIA Kepada Jaksa Penuntut Umum ; Dirampas untuk Negara ;</p> <p>- Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;</p>		<p>Subang, juga selaku Sekretaris Panitia Penjualan Kendaraan Bermotor/Per orangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang.</p> <p>- Kewenangan Terdakwa Maman Yudia sebagai Bupati dalam kaitannya dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pada pasal- pasal</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

Laporan Penelitian 2013

									<p>Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Pasal 1 angka 2 : Pasal 5 angka 1 : Gubernur/Bupati/Walikota adalah PEMEGANG KEKUASAAN pengelolaan barang milik daerah, angka 2, angka 3 dan Pasal 8 angka 1</p> <p>- Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi bukan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									<p>pendelegasia n, melainkan para Panitia sesuai Permendagri adalah mereka yang membantu didalam pelaksanaan teknis, yang selanjutnya hasil kerja panitia dituangkan dalam bentuk Surat keputusan dan mengenai perintah jabatan harus dimaknai bahwa pelaksanaann ya tetap harus sesuai</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

									<p>dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>- Masalah tersebut tidak akan terjadi apabila Para Terdakwa menggunakan kewenangan yang karena kedudukan dan jabatannya dengan baik yakni melakukan pemeriksaan yang teliti serta menolak hal yang tidak tepat.</p> <p>- Berdasarkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									<p>uraian fakta tersebut unsur Menyalahgun akan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti secara hukum</p> <p>- Melihat rumusan unsur keempat ini tampak bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									artinya bahwa akibat itu tidak perlu terjadi, dimana kata “DAPAT” mengandung pengertian bahwa “merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” tidak harus nyata-nyata timbul, akan tetapi sudah cukup apabila “akan” menimbulkan kerugian tersebut maka Tindak Pidana Korupsi itu
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									<p>sudah selesai dilakukan.</p> <p>- Yang dimaksud dengan “Merugikan” sama dengan menjadi rugi, menjadi berkurang keuangan Negara atau suatu kekayaan negara atau perekonomian Negara.</p> <p>- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									<p>yang menyebutkan “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”</p> <p>- Atas perbedaan penafsiran rumus harga majelis dapat menerima hasil perhitungan dari BPKP</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									<ul style="list-style-type: none"> - Hal lain yang juga dapat berpotensi menimbulkan kerugian yakni pelaksanaan penjualan tidak dilakukan dengan Lelang Umum/terbatas, karena sarana tersebut dapat lebih transparan dan terjadi persaingan sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih baik, selain daripada itu
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									melihat lampiran pembelaan Terdakwa II Tatun Daradjatun yakni hasil temuan BPK yang mengatakan bahwa karena nilai kendaraan diatas lima milyar maka seharusnya mendapat persetujuan DPRD; - Bahwa tahapan- tahapan yang dilakukan dengan baik tentunya selain akan menciptakan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									<p>transparansi juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga memperkecil potensi kerugian Negara yang akan timbul;</p> <p>- Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara hukum;</p> <p>- Terdakwa I i sesuai fakta</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									dipersidangan tidak begitu koreksi atau melakukan kontrol terhadap apa yang telah dikerjakan para pelaksana, dan oleh karena itu kemungkinan akan ada permasalahan maupun kekeliruan pada akhirnya memang terjadi. Masa kerja atau pengabdian Para Terdakwa yang cukup lama sebagai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

									<p>Pegawai Negeri Sipil seharusnya memahami perangkat yang ada dan melaksanakan dengan cermat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Majelis berpendapat bahwa unsur “Turut Serta atau secara bersama-sama melakukan” telah terbukti secara hukum - Menimbang bahwa fakta dipersidangkan menunjukan bahwa Terdakwa I ikut membeli
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									sebuah mobil jenis Nissan GR tahun 2003 dengan No.Pol.T 562 T dengan harga Rp. 43.420.000, yang menurut BPKP seharusnya nilai jual sebesar Rp. 66.800.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 23.380.000,- sedangkan Terdakwa II juga ikut membeli
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

									<p>sebuah mobil kijang tahun 2003 nomor polisi T 349 T seharga Rp. 20.347.200,- sehingga ada selisih kurang Rp. 12.052.800, menurut majelis nilai kurang itulah yang harus dibebankan pada Para Terdakwa untuk membayar uang Pengganti;</p> <p>- Tentang hukuman yang akan dijatuhkan majelis tidak</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

									<p>sependapat dengan Penuntut Umum yang majelis anggap terlalu berat, penjatuhan hukuman harus tidak boleh berdasarkan balas dendam, akan tetapi harus diukur dari modus operandi serta berat ringannya tindak pidana itu</p> <p>- Mengenai penghukuman yang berkaitan dengan uang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

									pengganti, majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang besarnya uang pengganti yang dikenakan pada Para Terdakwa, karena pengenaan hukuman tidak diikuti dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sehingga menentukan sejumlah uang sebagai
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Laporan Penelitian 2013

									<p>pengganti, yang menurut majelis terlalu berlebihan; - Menimbang bahwaberkait an dengan uang pengganti sudah ditegaskan dalam pasal 18 undang- undang tentang Pemberantas an Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada ayat 1 huruf b yang berbunyi “pembayaran uang pengganti</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

								yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;
								-
Alasan pengajuan banding: Jaksa Penuntut Umum : - Lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang kurang mencerminkan tuntutan rasa keadilan masyarakat - menyangkut uang pengganti yang seharusnya sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan dalam surat tuntutan; Terdakwa I : - Dikarenakan Tuntutan ganti rugi masih diajukan maka belum dapat dikategorikan dan/atau dianggap sebagai kerugian Negara, perkara ini termasuk wilayah Hukum administrasi Negara Terdakwa II : - Tidak disitanya SK Bupati nomor : 024/KEP.373-PLK/2008 dan SK Bupati nomor : 028/KEP.458-DPPKAD/2008 - Keberatan terhadap kesaksian Drs. Lugaya Mukhtar, - Keberatan atas dilakukannya audit oleh BPK serta kewenangan BPKP						PUTUSAN PENGADILAN TINGGI		Pokok-pokok pertimbangan Hakim PT
						Bunyi Amar Putusan PT	Sanksi Putusan PT	
						- Menerima permintaan banding Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut; - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 23 Juni 2011 Nomor :	- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ; - Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Denda masing	

Laporan Penelitian 2013

	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat sebelum penjualan harus telah disiapkan mobil dinas pengganti - Mekanisme tuntutan ganti rugi - Penafsiran analogis - Pengabaian peraturan tentang pegawai Negeri 	<p>10/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana penjara, denda dan hukuman kurungan pengganti dendanya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa MAMAN YUDIA Bin DUDUNG dan Terdakwa H.TATUN DARADJATUN ,SH,M.Si Bin SUPARMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</p>	<p>masing sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti masing masing selama : 1 (satu) tahun ; - Menghukum Terdakwa Tatun Daradjatun untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.12.052.800,- (dua belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), 	
--	---	--	---	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>sebagaimana dalam dakwaan Primer ;</p> <p>2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa MAMAN YUDIA Bin DUDUNG dan Terdakwa H.TATUN DARADJATUN SH,M.Si Bin SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-</p>		
--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>SAMA” ;</p> <p>4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun ;</p> <p>5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Denda masing masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;</p> <p>6. Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan pengganti masing masing selama : 1 (satu) tahun ;</p> <p>7. Menghukum Terdakwa Tatun</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>Daradjatun untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.12.052.800,- (dua belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila</p>		
--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;</p> <p>8. Menetapkan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>9. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>10. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. 5 (lima) lembar</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p> fotocopy Keputusan Bupati Subang Nomor : 024 KEP.373- PLK/2008, tanggal 8 September 2008, tentang pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan bermotor/per orangan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Subang ; b. 16 (enam belas) lembar fotocopy Keputusan Bupati Subang Nomor : </p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>028/Kep.458-DPPKAD/2008, tanggal 17 Nopember 2008, tentang penghapusan/penjualan kendaraan bermotor/orangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Subang ;</p> <p>c. 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2008, tanggal 08 Oktober 2008, tentang kriteria pemohon dan</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>kendaraan perorangan Dinas Milik Pemda Kab.Subang yang dapat dihapus/dijua 1 tahun 2008 ;</p> <p>d. 305 (tiga ratus lima) lembar bukti pembayaran dari pembeli kendaraan R- 2 kepada bendahara penerima DPPKAD ;</p> <p>e. 163 (seratus enam tiga) lembar bukti pembayaran dari pembeli kendaraan R- 4 kepada bendahara penerima</p>		
--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>DPPKAD ;</p> <p>f. 139 (seratus tiga sembilan) lembar Berita Acara Pemeriksaan /Penilaian teknis kendaraan bermotor (kendaraan roda empat) ;</p> <p>g. 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian teknis kendaraan bermotor (kendaraan</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>roda dua) ;</p> <p>h. 6 (enam)</p> <p>lembar</p> <p>rekapitulasi</p> <p>hasil</p> <p>pemeriksaan/</p> <p>penilaian</p> <p>kendaraan</p> <p>(dumb)</p> <p>kendaraan</p> <p>roda 4</p> <p>(empat) ;</p> <p>i. 9 (Sembilan)</p> <p>rekapitulasi</p> <p>hasil</p> <p>pemeriksaan/</p> <p>penilaian</p> <p>kendaraan</p> <p>(dumb)</p> <p>kendaraan</p> <p>roda 2 (dua) ;</p> <p>j. 7 (tujuh)</p> <p>lembar daftar</p> <p>honorarium</p> <p>kegiatan</p> <p>penghapusan</p> <p>asset barang</p>		
--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>daerah Dinas endapatan, pengelolaan keungan dan asset Daerah Kab.Subang ;</p> <p>k. 1 (satu) lembar fotocopy memo Bupati Subang kepada Sekda tertanggal 17 Nopember 2008 ;</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Kepala DPPKAD Kabupaten Subang Drs.H.ALUG AYA MUKHTAR, M.Si kepada</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>Bupati Subang perihal penanda tanganan Naskah Surat Keputusan Bupati Subang ; Tetap Terlampir dalam berkas perkara ; m. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Nissan Terano GR tahun 2003 dengan No.Pol.T 562 T, an.Pemerinta h Kab.Subang</p>		
--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>Noka WD21-M66177 Nosin Z24-956359Y (No.Pol. awal T 5 T) ;</p> <p>n. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No0339576/J B/2009 tanggal 24 Juli 2009 ; Dikelmbalik an kepada Terdakwa I. MAMAN YUDIA bin (Alm) DUDUNG ;</p> <p>o. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Toyota KF</p>		
--	--	---	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>70 Tahun 2003 jenis Mini Bus No.Pol.T- 1827 UR (No. Pol awal sebelum balik nama T 341 T kendaraan tersebut sebelumnya milik Pemerintahan Kab.Subang) No. Rangka MHF11KF70 30040288, Nosin 7K0594032 ; Dikembalika n kepada saksi Drs.Endang Aminullah, MM ; p. 1 (satu) unit kendaraan</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>roda 4 Toyota KF 70 Tahun 2003 Jenis Mini Bus No.Pol.T 1183 TD (No.Pol awal sebelum balik nama T 378 T kendaraan tersebut sebelumnya milik Pemerintahan Kab.Subang) No. Rangka MHF11KF70 30040540 Nosin 7- K0011237 ; Dikembalika n kepada saksi Drs.H.Rahm at Solihin ; q. Uang tunai</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		<p>sebesar Rp. 23.380.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penyetoran kerugian Negara dari isteri Terdakwa I.MAMAN YUDIA Kepada Jaksa Penuntut Umum ;</p> <p>Dirampas untuk Negara ;</p> <p>11. Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa masing masing</p>		
--	--	--	--	--

Laporan Penelitian 2013

		sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;		
	Nama Hakim Pengadilan Tinggi: Ny. Pasti Serefina Sinaga,SH.,MH (ketua) Soebagio Wirosoemarto (anggota) Irwan Rambe, SH., MH (anggota)			
	Kasus Posisi:			

LAMPIRAN 4

Berupa Foto copy salinan putusan (terpisah)

LAMPIRAN V

WAWANCARA DENGAN HAKIM TIPIKOR

1. Bagaimana ukuran pembatasan denda dalam kasus Tipikor ?

Jawaban

Penentuan denda dalam kasus Tipikor ada maksimal dan minimal, dilihat dari kepantasan. Jadi sifatnya kasuistik. Bila denda tidak dibayar disubsidairkan jadi pidana kurungan.

2. Apakah Pasal 55 ayat (1) KUHP perlu dibuktikan, dan bagaimana kualifikasinya ?

Jawaban

Perlu dibuktikan Pasal 55 ayat (1) KUHP, misalnya Tipikor secara bersama-sama melakukan tindak pidana.

3. Bagaimana penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan kasus-kasus Tipikor di PN Bandung, apakah sudah diterapkan sesuai dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 ?

Jawaban

Sudah diterapkan sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 diperuntukan untuk setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri, jadi baik Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.

Catatan :

Dalam perkara *aquo* dengan Terdakwa Mochtar Mohamad, Hakim PN telah keliru menerapkan Pasal 2 ayat (1) hanya berlaku bagi pegawai negeri, sehingga tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang berstatus sebagai pejabat Negara yaitu Walikota Bekasi, yang menurutnya tidak bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1).

Keterangan :

Wawancara terkait putusan No. 22... tidak dapat dilakukan dengan Majelis Hakim yang memutus perkara karena, menolak untuk diwawancara, terkait putusan tersebut.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung

Senin, 10 Juni 2013

Joko

Laporan Penelitian 2013

Senin, 23/05/2011 17:59 WIB
Mantan Ketua BK DPRD Jabar Dituntut 4,5 Tahun Penjara
Tya Eka Yulianti - detikBandung

Bandung - Jaksa Penuntut Umum menuntut Mantan Ketua BK DPRD Jabar yang juga Mantan Wakil Bupati Subang Maman Yudia pidana penjara 4,5 tahun. Maman pun diminta membayar uang pengganti pada negara sebesar Rp 548 juta.

Tak hanya Maman, Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Subang Tatum Darajatun juga dituntut 4,5 tahun dengan denda yang lebih besar yaitu Rp 571 juta.

Tuntutan tersebut bukanlah dari dakwaan primer JPU, melainkan subsider. JPU yang diketuai oleh Teguh Haryanto membebaskan keduanya dari dakwaan primer yaitu pasal 2 ayat 1 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan subsider sendiri yaitu Pasal 3 juncto pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka turut atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kesempatan atau sarana karena jabatan yang ada, yang berpeluang merugikan keuangan negara," ujar JPU yang membacakan berkas dakwaan secara bergantian di ruang sidang III Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Senin (23/5/2011).

Dalam tuntutanannya, JPU meminta agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara pada kedua terdakwa dengan hukuman masing-masing selama 4 tahun 6 bulan. Selain itu, keduanya pun diharuskan membayar uang pengganti terhadap negara. Terdakwa I yaitu Maman Yudia diharuskan membayar Rp Rp 548.527.420 dan Terdakwa II yaitu Tatum Darajatun sebesar 571.097.420

"Dengan ketentuan, jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai ketetapan hukum yang sah, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata JPU.

Namun jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka uang pengganti pada negara diganti dengan pidana penjara.

"Masing-masing selama 2 tahun 3 bulan," katanya.

Kedua terdakwa yang duduk bersebelahan di bangku terdakwa terlihat seksama mendengarkan tuntutan dibacakan. Keduanya mengenakan pakaian serupa, yaitu kemeja putih lengan panjang, celana pantalon hitam dan sepatu vantopel hitam.

Laporan Penelitian 2013

Sidang akan dilanjutkan pada Jumat (3/6/2011) mendatang.

Maman Yudia menjadi terdakwa dugaan korupsi sebesar Rp. 1,1 miliar dalam kasus lelang kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Saat ia menjabat sebagai wakil bupati Subang dan menjadi Pejabat Bupati menjelang pemilukada 2008, ia membuat kebijakan, melelang 140 unit mobil dinas dan 298 unit sepeda motor, termasuk mobil dinas yang selama ini digunakan dirinya, dengan harga murah. Padahal kendaraan tersebut belum waktunya diikutsertakan dalam lelang. Akibat kebijakannya tersebut Negara dirugikan Rp 1,1 miliar.

(tya/ern)

<http://news.detik.com/bandung/read/2011/05/23/175927/1645239/486/mantan-ketua-bk-dprd-jabar-dituntut-45-tahun-penjara>

Divonis Setahun Penjara, Ketua BK DPRD Jabar Menangis Sembari Mengumpat

Kamis, 23 Juni 2011, 16:32 WIB

Komentar : 0



Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Terdakwa perkara dum kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Subang senilai Rp 1,1 miliar tahun 2008, menangis, usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta terhadap dirinya.

"Aing mah teu nyaho nanaon. Bodo, belegug, goblog sia Tatun aing te ngalebok duit saperak perak acan. (Saya tidak tahu apa-apa. Berengsek kamu Tatun. Saya tidak makan uang itu sedikitpun)," kata Maman memaki sambil menangis meninggalkan ruang sidang. Sambil menangis Maman Yudia dibopong ke luar ruangan sidang oleh keluarganya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jawa Barat non aktif Maman Yudia, divonis satu tahun penjara dan denda karena terlibat kasus korupsi lelang dump kendaraan Dinas Kabupaten Subang.

"Menjatuhkan vonis penjara selama satu tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidi dua bulan penjara kepada terdakwa pertama Maman Yudia," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso, di Ruang 3 Gedung Pengadilan Tipikor Bandung.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

(JPU) selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 55 juta.

Menurutnya, terdakwa terbukti melanggar pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut merupakan pasal subsider yang didakwakan oleh JPU.

Selain menjatuhkan vonis kepada Maman Yudia, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung juga menjatuhkan vonis kepada Sekretaris Panitia Lelang atau dump kendaraan bermotor dalam perkara ini yang juga menjabat sebagai Kabag Perlengkapan Pemkab Subang Tatun Darajatun, yang divonis selama satu tahun dan denda Rp 50 juta.

Redaktur : Siwi Tri Puji B

Sumber : Antara

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/06/23/ln8l6s-divonis-setahun-penjara-ketua-bk-dprd-jabar-menangis-sembari-mengumpat>

Jumat, 24 Juni 2011

Korupsi Lelang Dump Kendaraan Dinas: Ketua BK DPRD Jabar Divonis 1 Tahun



Pengadilan Tipikor Bandung

Bandung - Terdakwa perkara dump kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Subang senilai Rp 1,1 miliar tahun 2008, menangis, usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta terhadap dirinya.

“Aing mah teu nyaho nanaon. Bodo, belegug, goblog sia Tatun aing te ngalebok duit saperak perak acan. (Saya tidak tahu apa-apa. Berengsek kamu Tatun. Saya tidak makan uang itu sedikitpun),” kata Maman memaki sambil menangis meninggalkan ruang sidang. Sambil menangis Maman Yudia dibopong ke luar ruangan sidang oleh keluarganya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jawa Barat non aktif Maman Yudia, divonis satu tahun penjara dan denda karena terlibat kasus korupsi lelang dump kendaraan Dinas Kabupaten Subang. “Menjatuhkan vonis penjara selama satu tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan penjara kepada terdakwa pertama Maman Yudia,” kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso, di Ruang 3 Gedung Pengadilan Tipikor Bandung.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 55 juta. Menurutny,

Laporan Penelitian 2013

terdakwa terbukti melanggar pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut merupakan pasal subsider yang didakwakan oleh JPU.

Selain menjatuhkan vonis kepada Maman Yudia, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung juga menjatuhkan vonis kepada Sekretaris Panitia Lelang atau dump kendaraan bermotor dalam perkara ini yang juga menjabat sebagai Kabag Perlengkapan Pemkab Subang Tatun Darajatun, yang divonis selama satu tahun dan denda Rp 50 juta. (Siwi Tri Puji B)

Sumber: Antaranews, Kamis, 23 Juni 2011

Sumber Foto: pedulirakyat-online.com

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9158&l=korupsi-lelang-dump-kendaraan-dinas-ketua-bk-dprd-jabar-divonis-1-tahun>

Mantan Bupati Subang Tersangka Korupsi

Annas Nasrullah - Koran SI

Browser anda tidak mendukung iFrame

Jum'at, 7 Agustus 2009 14:21 wib

SUBANG - Polres Subang memeriksa mantan Bupati Subang Maman Yudia sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi lelang kendaraan dinas Pemkab Subang senilai Rp2.143.125.160.

Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Subang Jalan Mayjen Soetoyo sejak pukul 09.30 WIB. Pemeriksaan masih berjalan hingga saat ini. Maman Yudia yang tiba mengenakan pakaian batik langsung menuju ruang pemeriksaan Unit V Tipikor dan Suap Polres Subang.

Maman Yudia dinyatakan terlibat dalam proses lelang kendaraan dinas sebanyak 140 kendaraan roda empat dan 290 kendaraan roda dua pada September 2009 lalu. Kapolres Subang AKBP Sugiyono menyatakan, keterlibatan Maman dalam kasus tersebut kapasitas dia pada saat itu sebagai Bupati Subang, menggantikan Eep Hidayat yang maju dalam Pilkada 2008.

Dari hasil pemeriksaan 13 saksi dan sejumlah bukti, Maman diduga kuat terlibat dalam penjualan kendaraan dinas tersebut. Selain Maman, dalam kasus ini polisi juga menetapkan tersangka kepada mantan Kepala Bagian Perlengkapan Setda Subang Tatun Daradjatun.

"Saat ini beliau masih dalam pemeriksaan tim penyidik. Beliau sudah kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan sejumlah saksi," tegas Kapolres.

Sementara itu, pemeriksaan Maman Yudia dilakukan dalam dua tahap, yakni sejak pukul 08.30 WIB-11.30 WIB dan setelah Salat Jumat. Disela jeda, Maman mengaku diberondong delapan pertanyaan seputar kapasitas dan wewenang Bupati.

Disinggung statusnya sebagai tersangka, Maman mengaku belum mengetahui, "Saya belum tahu, kalau menetapkan status itu kan kita diberitahu. Dan saya hadir hanya untuk pemeriksaan," pungkas Maman sambil berlalu. **(teb)**

<http://autos.okezone.com/read/2009/08/07/1/245944/1/search.html>